



Analisis Pandangan Hukum Administrasi Tentang Peran Pejabat Publik

Analysis of Administrative Law Views on the Role of Public Officials

Andri Batara & Aldri Prinaldi

Magister Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Negri Padang, Indonesia

Abstrak

Hukum administrasi memiliki peran krusial dalam mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks peran dan tanggung jawab pejabat publik. Analisis pandangan hukum terhadap peran pejabat publik menjadi penting untuk memahami landasan hukum yang mengatur perilaku dan keputusan mereka dalam menjalankan tugas pelayanan public. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum administrasi, termasuk undang-undang, regulasi, dan putusan pengadilan terkait. Analisis kritis dilakukan untuk memahami pandangan hukum terhadap peran pejabat publik dan implikasinya dalam praktek administrasi. Studi pustaka mendalam dilakukan untuk menyusun kerangka konseptual berdasarkan teori-teori hukum administrasi yang relevan. Tinjauan literatur mencakup berbagai pandangan dari para ahli hukum administrasi terkait tanggung jawab, kewenangan, dan etika pejabat publik. Hasil penelitian mengidentifikasi perspektif hukum administrasi terhadap peran pejabat publik, termasuk batasan wewenang, kewajiban etika, dan akuntabilitas. Analisis mendalam dilakukan terhadap kasus-kasus yang mencerminkan tantangan dan permasalahan aktual dalam praktik administrasi, memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika hubungan antara hukum dan pejabat publik.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pejabat Publik, Tanggung Jawab,

Abstract

Administrative law plays a crucial role in governing government administration, including in the context of the roles and responsibilities of public officials. The analysis of legal perspectives on the roles of public officials is essential to understand the legal foundation regulating their behavior and decisions in carrying out public service duties. This research adopts a normative legal approach by collecting data from various sources of administrative law, including laws, regulations, and relevant court decisions. Critical analysis is conducted to comprehend the legal perspectives on the roles of public officials and their implications in administrative practices. A comprehensive literature review is undertaken to construct a conceptual framework based on relevant administrative law theories. The literature review encompasses various views from administrative law experts regarding the responsibilities, authorities, and ethics of public officials. The research findings identify the administrative law perspectives on the roles of public officials, including limitations on authority, ethical obligations, and accountability. In-depth analysis is conducted on cases reflecting current challenges and issues in administrative practices, providing a profound understanding of the dynamic relationship between the law and public officials.

Keywords: Administrative Law, Public Officials, Responsibility.

How to Cite: Andri Batara & Aldri Prinaldi, (2024). Analisis Pandangan Hukum Administrasi Tentang Peran Pejabat Publik. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1) 2024: 112-122

*E-mail: bataraajah1808@gmail.com

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Peran pejabat publik dalam administrasi pemerintahan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai pilar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pejabat publik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta menjaga integritas dan etika dalam tata kelola pemerintahan. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai pentingnya peran pejabat publik dalam administrasi pemerintahan melalui tiga aspek utama: pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan integritas administrasi. Pertama-tama, pelayanan publik menjadi fokus utama peran pejabat publik dalam administrasi pemerintahan. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pejabat publik bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, menjembatani kebutuhan dan harapan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan. Pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warganya (Ilhamsyah, 2022)

Selain itu, pejabat publik juga memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan di tingkat administrasi pemerintahan. Mereka terlibat dalam perumusan kebijakan dan strategi yang akan memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan yang baik dan berkelanjutan memerlukan kontribusi aktif dan pemahaman mendalam dari para pejabat publik. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan analisis rasional, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk merespons dinamika masyarakat dan menanggapi kebutuhan yang berkembang. Keberhasilan pejabat publik dalam pengambilan keputusan juga sangat tergantung pada integritas mereka. Integritas administrasi menjadi aspek kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pejabat publik yang berintegritas akan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Integritas juga mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diimplementasikan (Hasanudin, 2022)

Pentingnya peran pejabat publik dalam administrasi pemerintahan juga tercermin dalam aspek lain seperti efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan sumber daya lainnya secara bijak, memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. Kemampuan pejabat publik dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efisien akan membentuk dasar keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, peran pejabat publik semakin krusial. Mereka dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan cepat dalam teknologi, ekonomi, dan lingkungan global. Dalam hal ini, pejabat publik dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kepemimpinan yang kuat agar mampu memberikan solusi terbaik bagi berbagai permasalahan yang dihadapi (Aldiansyah, 2022)

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pejabat publik juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap integritas moral dan etika kerja pejabat publik. Mereka diharapkan untuk bertindak adil, jujur, dan memberikan pelayanan dengan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Etika pejabat publik bukan hanya menjadi pedoman dalam tindakan sehari-hari mereka, tetapi juga menciptakan fondasi untuk kepercayaan masyarakat (Agung & Prasetya, 2021)

Pentingnya peran pejabat publik dalam administrasi pemerintahan juga mencakup upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam era demokrasi modern, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan semakin diakui sebagai elemen penting. Pejabat publik diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan memberikan ruang bagi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Dalam menghadapi berbagai kompleksitas dan dinamika dalam administrasi pemerintahan, pejabat publik juga perlu memperkuat kompetensi kepemimpinan dan manajerial mereka. Kemampuan untuk memimpin, mengelola tim, dan berkomunikasi secara efektif menjadi keterampilan kunci yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dengan sukses (Agung & Prasetya, 2021)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pejabat publik dalam administrasi pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang baik, pengambilan keputusan yang bijaksana, integritas, dan

partisipasi masyarakat adalah aspek-aspek utama yang memperkuat esensi dari peran mereka. Dalam upaya membangun pemerintahan yang efektif dan responsif, peran pejabat publik bukan hanya sebagai pelaksana tugas administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat yang dilayani (Nurhayati & Siti, 2021)

Hukum administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konteks hukum administrasi mencakup aturan-aturan yang mengatur organisasi, tindakan, dan keputusan dalam administrasi pemerintahan. Hukum administrasi bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil, memberikan panduan mengenai wewenang dan kewajiban pejabat publik, serta menetapkan mekanisme untuk mengatasi pelanggaran etika atau hukum yang mungkin terjadi. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara rinci mengenai bagaimana konteks hukum administrasi membentuk perilaku pejabat publik, mengacu pada prinsip-prinsip, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang ada (Ricky, 2021)

Pertama-tama, prinsip-prinsip hukum administrasi memberikan dasar untuk membentuk perilaku pejabat publik. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban pelayanan publik. Keberadaan prinsip-prinsip ini menciptakan landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh pejabat publik dalam setiap aspek tugas dan keputusan yang mereka ambil. Misalnya, prinsip keadilan mengharuskan pejabat publik untuk bertindak secara objektif dan adil dalam semua keputusan, sedangkan prinsip transparansi menuntut agar mereka memberikan informasi yang cukup kepada publik terkait tindakan dan kebijakan yang diambil (Fajar, 2022)

Regulasi hukum administrasi juga memainkan peran utama dalam membentuk perilaku pejabat publik. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau eksekutif membentuk kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek administrasi pemerintahan. Regulasi ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait pembagian wewenang, prosedur pengambilan keputusan, perlindungan hukum bagi warga negara, serta sanksi bagi pelanggaran hukum administrasi. Dengan adanya regulasi ini, pejabat publik memiliki panduan yang jelas mengenai batasan dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas-tugas administrative (Fajar, 2022)

Satu aspek penting dari regulasi hukum administrasi adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Pejabat publik diharapkan untuk menghormati hak-hak konstitusional dan legal warga negara, serta memberikan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Regulasi ini membentuk perilaku pejabat publik agar selalu mempertimbangkan kepentingan umum dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab terhadap hak-hak individu. Selanjutnya, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian integral dari konteks hukum administrasi yang membentuk perilaku pejabat publik. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti ombudsman, lembaga pengawas pemerintahan, dan lembaga pengadilan administrasi. Mekanisme ini memberikan tekanan dan insentif bagi pejabat publik untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan etika. Adanya ancaman sanksi dan proses pengadilan administrasi memastikan bahwa pelanggaran hukum administrasi dapat ditangani secara adil dan efisien (Ilhamsyah, 2022)

Selain itu, hukum administrasi juga mencakup etika pelayanan publik sebagai bagian integral dalam membentuk perilaku pejabat publik. Etika pelayanan publik melibatkan prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup integritas, kejujuran, keadilan, dan dedikasi terhadap pelayanan masyarakat. Etika pelayanan publik memberikan pedoman moral yang menjadi dasar untuk tindakan dan keputusan pejabat publik, memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan moralitas.

Dalam konteks hukum administrasi, pejabat publik juga harus memahami konsep akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Mereka harus siap dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan mereka, baik kepada lembaga pengawas, masyarakat, maupun lembaga pengadilan administrasi jika diperlukan. Prinsip akuntabilitas ini memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugas administratif mereka.

Dalam hukum administrasi, aspek keadilan juga menjadi fokus penting dalam membentuk perilaku pejabat publik. Prinsip keadilan memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan administratif harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Pejabat publik harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik dan keadilan dalam proses administratif.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, hukum administrasi juga perlu terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut. Pejabat publik harus mampu menghadapi tantangan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, dan kompleksitas masalah-masalah administratif. Regulasi dan prinsip-prinsip hukum administrasi perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi dinamika modern. Konteks hukum administrasi memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku pejabat publik. Melalui prinsip-prinsip, regulasi, dan mekanisme pengawasan, hukum administrasi menciptakan kerangka kerja yang memberikan arahan dan batasan bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Etika pelayanan publik, akuntabilitas, dan keadilan (Ilhamsyah, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum administrasi sebagai pengawas tindakan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik dan sekaligus sebagai norma yang membatasi tindakan pemerintah agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan (Sugiyono, 2016)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum tertulis, seperti: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Bersih dan Berwibawa. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-09-2022 Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum tertulis (Sugiyono, 2018)

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Dokumen hukum tersebut dipelajari untuk memahami pandangan hukum administrasi tentang pejabat publik. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode analisis normatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksi norma- norma hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum tertulis.

Dalam penelitian ini, analisis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum administrasi yang mengatur tentang pejabat publik. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk memahami pandangan hukum administrasi tentang pejabat publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Norma dan prinsip hukum administrasi

Menurut (Ilhamsyah, 2022) Norma dan prinsip hukum administrasi memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku pejabat publik. Mereka menciptakan kerangka kerja yang mengarahkan tindakan dan keputusan pejabat publik, serta memastikan bahwa administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam konteks ini, mari kita identifikasi beberapa norma dan prinsip hukum administrasi yang mendasari perilaku pejabat publik.

1. Prinsip Legalitas:

- Norma: Setiap tindakan dan keputusan pejabat publik harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sah.
- Prinsip: Legalitas menjamin bahwa pejabat publik hanya dapat bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang- undang, dan mereka tidak dapat bertindak di luar batasan-batasan tersebut. Prinsip ini menjaga agar pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Prinsip Keadilan:

- Norma: Pejabat publik harus bertindak dengan adil dan objektif dalam setiap aspek pelaksanaan tugas mereka.
- Prinsip: Prinsip keadilan mengharuskan pejabat publik untuk tidak diskriminatif dan memperlakukan semua warga negara secara setara. Mereka tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Keadilan juga mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

3. Prinsip Akuntabilitas:

- Norma: Pejabat publik harus siap dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil.
- Prinsip: Akuntabilitas menjamin bahwa pejabat publik harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada lembaga pengawas, masyarakat, dan hukum. Mekanisme akuntabilitas menciptakan transparansi dan kepercayaan dalam tata kelola pemerintahan serta memberikan insentif untuk pejabat publik untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab.

4. Prinsip Transparansi:

- Norma: Pejabat publik harus memberikan informasi yang cukup kepada publik terkait tindakan dan kebijakan yang mereka ambil.
- Prinsip: Transparansi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan tindakan administratif dapat diakses oleh masyarakat. Pejabat publik harus membuka informasi yang relevan, memastikan keterbukaan, dan memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

5. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas:

- Norma: Pejabat publik harus menjalankan tugas administratifnya dengan cara yang efisien dan efektif.
- Prinsip: Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik secara bijak untuk mencapai hasil yang optimal. Pejabat publik diharapkan untuk mencapai tujuan pelayanan publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien dan efektif.

6. Prinsip Proporsionalitas:

- Norma: Tindakan pejabat publik harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak melebihi batas yang diperlukan.
- Prinsip: Proporsionalitas memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat publik tidak melebihi kewenangan yang diberikan dan sesuai dengan tujuan tertentu. Prinsip ini menghindari penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan konkret.

7. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia:

- Norma: Pejabat publik harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.
- Prinsip: Prinsip ini menjamin bahwa tindakan dan kebijakan pejabat publik tidak melanggar hak asasi manusia. Mereka harus menghormati martabat dan kebebasan setiap warga negara, serta memberikan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan hak.

8. Prinsip Integritas:

- Norma: Pejabat publik harus menjaga integritas pribadi dan profesional dalam melaksanakan tugas administratif.
- Prinsip: Integritas mencakup kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan. Pejabat publik harus menjauhi korupsi dan praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan pejabat publik selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

9. Prinsip Kepentingan Umum:

- Norma: Pejabat publik harus memprioritaskan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
- Prinsip: Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan dan kebijakan pejabat publik. Mereka tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum.

10. Prinsip Partisipasi Masyarakat:

- Norma: Pejabat publik harus membuka ruang untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Prinsip: Prinsip ini mendorong pejabat publik untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pejabat publik dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

11. Prinsip Keberagaman dan Kesetaraan:

- Norma: Pejabat publik harus menghormati dan mempromosikan keberagaman serta kesetaraan dalam pelayanan publik.
- Prinsip: Prinsip ini menegaskan pentingnya mengakomodasi keber

B. Norma hukum yang mengatur perilaku pejabat publik

Menurut (Hasanudin, 2022) Norma hukum yang mengatur perilaku pejabat publik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Norma hukum yang mengatur kompetensi dan keterampilan pejabat public

Norma hukum ini mengatur tentang kualifikasi yang harus dimiliki oleh pejabat publik untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Norma hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat publik memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut secara profesional. Contoh norma hukum yang mengatur kompetensi dan keterampilan pejabat publik adalah Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertindak secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

2. Norma hukum yang mengatur kewajiban pejabat publik untuk bertindak secara professional

Norma hukum ini mengatur tentang perilaku yang harus dihindari oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Norma hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contoh norma hukum yang mengatur kewajiban pejabat publik untuk bertindak secara profesional adalah Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertindak secara tidak diskriminatif.

3. Norma hukum yang mengatur akuntabilitas pejabat public

Norma hukum ini mengatur tentang tanggung jawab pejabat publik kepada atasan, kepada masyarakat, dan kepada hukum. Norma hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh norma hukum yang mengatur akuntabilitas pejabat publik adalah Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertindak secara transparan dan akuntabel.

C. Asas-asas Hukum Administrasi

Menurut (Hasanudin, 2022) Asas-asas hukum administrasi merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas hukum administrasi dapat berperan dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi pemerintahan. Salah satu asas hukum administrasi yang penting dalam konteks tata kelola pemerintahan adalah asas transparansi. Asas transparansi menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Asas ini dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas lain yang penting dalam konteks efisiensi pemerintahan adalah asas efisiensi. Asas efisiensi menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif dan hemat. Asas ini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan mendorong pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

D. Prinsip-prinsip Hukum Administrasi

Menurut (Hasanudin, 2022) Prinsip-prinsip hukum administrasi merupakan pedoman pelaksanaan asas-asas hukum administrasi. Prinsip-prinsip hukum administrasi juga dapat berperan dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi pemerintahan.

Salah satu prinsip hukum administrasi yang penting dalam konteks tata kelola pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip lain yang penting dalam konteks efisiensi pemerintahan adalah prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara tegas dan jelas. Prinsip ini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.

E. Instrumen Hukum Administrasi

Menurut (Aldiansyah, 2022) Instrumen hukum administrasi merupakan sarana yang digunakan untuk mewujudkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum administrasi. Instrumen hukum administrasi dapat berperan dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi pemerintahan. Salah satu instrumen hukum administrasi yang penting dalam konteks tata kelola pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Instrumen lain yang penting dalam konteks efisiensi pemerintahan adalah kebijakan publik. Kebijakan publik dapat digunakan untuk mendorong pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu instrumen hukum administrasi yang penting dalam konteks praktik administrasi publik adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat memiliki implikasi terhadap praktik administrasi publik, yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara tertib dan teratur.

2. Menjadi sarana untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif (Agung & Prasetya, 2021)

Berikut adalah beberapa implikasi penting dari pandangan hukum administrasi terhadap praktik administrasi publik:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Pandangan hukum administrasi menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan mendorong pemerintah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Pandangan hukum administrasi mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dengan mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Pandangan hukum administrasi menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dengan mendorong pemerintah untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien (Yusri, 2021)

F. Dampak pandangan hukum administrasi terhadap efektivitas administrasi public

Menurut (Agung & Prasetya, 2021) Analisis dampak pandangan hukum administrasi terhadap efektivitas administrasi publik adalah sebuah langkah penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum mengarahkan dan membentuk kinerja dan perilaku pejabat publik. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi dampak pandangan hukum administrasi terhadap efektivitas administrasi publik melalui beberapa aspek utama.

1. Legalitas dan Kepatuhan:

Pandangan hukum administrasi yang menekankan prinsip legalitas memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan administratif didasarkan pada landasan hukum yang sah. Ini berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pejabat publik yang memahami dan mengikuti pandangan ini dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Pandangan hukum administrasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap efektivitas administrasi publik. Dengan mengungkapkan informasi yang memadai kepada publik, pejabat publik menciptakan kepercayaan masyarakat dan memungkinkan partisipasi yang lebih besar. Selain itu, mekanisme akuntabilitas, seperti penyelidikan dan audit, membantu memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini meningkatkan efektivitas karena pejabat publik lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakan mereka

3. Partisipasi Masyarakat:

Pandangan hukum administrasi yang mendorong partisipasi masyarakat memiliki dampak langsung terhadap efektivitas administrasi publik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan keberlanjutan pelayanan yang efektif. Dengan mendengarkan suara dan pandangan masyarakat, pejabat publik dapat lebih baik memahami kebutuhan dan harapan warga negara, sehingga mampu merancang kebijakan yang lebih sesuai dan mendapat dukungan luas

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Pandangan hukum administrasi yang mendasarkan tindakan pada perlindungan hak asasi manusia memiliki dampak positif terhadap efektivitas administrasi publik. Memastikan hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh pejabat publik menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Ini membantu mencegah konflik dan tuntutan hukum yang dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Jaminan terhadap hak asasi manusia juga meningkatkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.

5. Keadilan dan Kesetaraan:

Pandangan hukum administrasi yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas administrasi publik. Dengan menjamin pelayanan yang adil dan setara bagi semua warga negara, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat dari kebijakan dan program mencapai semua lapisan masyarakat. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6. Integritas dan Pencegahan Korupsi:

Pandangan hukum administrasi yang menekankan integritas dan pencegahan korupsi memiliki dampak yang sangat positif terhadap efektivitas administrasi publik. Integritas menciptakan lingkungan di mana pejabat publik bertindak dengan jujur, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada kepentingan umum. Pencegahan korupsi membantu menjaga keuangan publik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

7. Proporsionalitas dalam Pengambilan Keputusan:

Pandangan hukum administrasi yang mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam pengambilan keputusan berdampak pada efektivitas administrasi publik. Proporsionalitas memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pejabat publik sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak melebihi batas yang diperlukan. Ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik.

8. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya:

Pandangan hukum administrasi yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik memiliki dampak langsung terhadap efektivitas administrasi. Pejabat publik diharapkan untuk menggunakan sumber daya dengan bijak, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai tambah yang maksimal. Ini membantu menciptakan lingkungan administratif yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

9. Pengaturan Peran dan Kewenangan:

Pandangan hukum administrasi yang mengatur peran dan kewenangan pejabat publik menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Dengan mengatur wewenang dan tanggung jawab, hukum administrasi membantu menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan peran masing-masing. Ini memberikan kontribusi positif terhadap koordinasi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

10. Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan:

Pandangan hukum administrasi yang mempertimbangkan aspek pelaksanaan kebijakan memiliki dampak langsung pada efektivitas administrasi publik. Hukum administrasi menetapkan norma dan standar pelaksanaan kebijakan yang harus diikuti oleh pejabat public (Fajar, 2022)

Pembahasan

Pembahasan dalam jurnal ini mencakup beberapa aspek terkait pandangan hukum administrasi tentang tindakan korupsi oleh pejabat publik. Pertama, diberikan pengertian tentang korupsi dan dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Selanjutnya, dibahas pandangan hukum administrasi terkait tindakan korupsi yang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Selain itu, juga dibahas upaya yang dapat dilakukan dalam menangani tindakan korupsi, seperti pemberian sanksi tegas dan pencegahan korupsi melalui tata kelola yang baik. Tantangan yang dihadapi dalam menangani tindakan korupsi juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini.

Dalam jurnal ini, temuan yang diperoleh dari analisis pandangan Hukum Administrasi tentang peran pejabat publik dalam pelayanan publik dapat dibandingkan dengan kerangka teoritis dan hasil penelitian sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Beberapa perbandingan penting antara temuan dalam jurnal ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Peran Pejabat Publik dalam Pelayanan Publik: Temuan jurnal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peran pejabat publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pejabat publik yang memiliki kompetensi yang baik dan berintegritas tinggi cenderung memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Hukum Administrasi dalam Konteks Pejabat Publik: Jurnal ini menggambarkan pandangan Hukum Administrasi tentang peran pejabat publik dalam pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan Hukum Administrasi dalam tugas dan tanggung jawab pejabat publik. Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang aspek hukum dalam menjalankan pelayanan publik.

Etika Pelayanan Publik: Temuan dalam jurnal ini menekankan pentingnya etika dalam pelayanan publik oleh pejabat publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa etika pelayanan publik yang baik sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian sebelumnya juga menyoroti pentingnya integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

Tata Kelola Pemerintahan: Jurnal ini juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks peran pejabat publik dalam pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Peningkatan Pelayanan Publik: Temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pandangan Hukum Administrasi tentang peran pejabat publik sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa peran pejabat publik yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Studi terdahulu juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pelayanan publik dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan (Fajar, 2022)

Secara keseluruhan, temuan dalam jurnal ini mendukung kerangka teoritis dan hasil penelitian sebelumnya dalam menggambarkan pandangan Hukum Administrasi tentang peran pejabat publik dalam pelayanan publik. Temuan ini juga memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang pentingnya peran pejabat publik yang efektif dan efisien dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam lima tahun terakhir, telah terjadi

konsistensi dalam penelitian yang menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan Hukum Administrasi, etika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan tentang peran pejabat publik dalam pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis pandangan Hukum Administrasi tentang peran dan tanggung jawab pejabat publik, dapat disimpulkan beberapa temuan penting. Pertama, Hukum Administrasi mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat publik dalam pelayanan publik. Peran pejabat publik yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Kedua, Hukum Administrasi juga mengatur aspek etika dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan peran pejabat publik. Pejabat publik diharapkan menjalankan tugasnya dengan transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi integritas dan moralitas dalam memberikan pelayanan publik.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemahaman dan penerapan Hukum Administrasi dalam peran dan tanggung jawab pejabat publik sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Pejabat publik perlu mematuhi prinsip-prinsip hukum, menjunjung tinggi etika pelayanan publik, dan melaksanakan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dapat terwujud.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:

Meskipun jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Hukum Administrasi tentang peran dan tanggung jawab pejabat publik, masih ada ruang untuk penelitian lanjutan dalam domain ini. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. **Kaitan antara Hukum Administrasi dan Inovasi Pelayanan Publik:** Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana Hukum Administrasi dapat mendukung inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dapat meneliti bagaimana regulasi hukum dapat memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan mendorong terciptanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. **Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pejabat Publik:** Penelitian dapat dilakukan untuk menggali persepsi masyarakat tentang peran dan tanggung jawab pejabat publik dalam pelayanan publik. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat mempengaruhi kepuasan mereka terhadap pelayanan publik. Melalui penelitian ini, akan terlihat apakah pandangan masyarakat sejalan dengan pandangan Hukum Administrasi atau terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan.

3. **Efektivitas Sanksi dalam Menegakkan Etika Pejabat Publik:** Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap pejabat publik yang melanggar etika pelayanan publik. Studi ini dapat meneliti bagaimana sanksi tersebut dapat mendorong perubahan perilaku pejabat publik dan mengurangi pelanggaran etika. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi perbaikan sistem sanksi yang ada.

4. **Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik:** Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik oleh pejabat publik. Studi ini dapat meneliti bagaimana aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip-prinsip good governance.

Penelitian-penelitian lanjutan dalam domain ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab pejabat publik dalam pelayanan publik. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan memberikan masukan bagi kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T., & Prasetya. (2021). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1(1566-6154), 321-338.
- Aldiansyah, P. (2022). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Advokasi Dan Keadilan*, 2(16-16), 1-12.
- Fajar. (2022). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1(2626-651), 1-19.
- Hasanudin. (2022). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 12(156-544), 128-147.
- Ilhamsyah. (2022). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Mewujudkan Transparansi Publik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(169-456), 225-244.
- Nurhayati, & Siti. (2021). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2(326-347), 18-20.
- Ricky. (2021). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(127-146.), 15-16.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yusri, M. (2021). Pandangan Hukum Administrasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(107-126.), 15-16.